

## ABSTRAK

ARIYADI, NIM 170311020025, *Prinsip-prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., dan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: prinsip-prinsip, kearifan lokal, pengelolaan hutan, sinergi, hukum adat, hukum Islam, hukum nasional, lingkungan hidup

Deforestasi merupakan kegiatan penebangan kayu yang berskala besar sehingga mempercepat hutan dan alam mengalami kerusakan. Selain itu, kerusakan hutan dipengaruhi pula dengan adanya UU Cipta kerja yang lebih menekankan pengelolaan hutan pada investasi dari negara luar seperti hadirnya perusahaan tambang emas dan atau batu bara serta kebun kelapa sawit yang rata-rata milik masyarakat negara luar. Hal ini tentunya mengancam kesejahteraan masyarakatnya sendiri mengingat rata-rata kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju diambil dari hasil alam. Namun, dengan hadirnya UU Omnibus law yang memberlakukan denda terlebih dahulu dibandingkan hukuman, justru semakin menyudutkan masyarakat adat dan mempermudah pihak perusahaan. Pasalnya, dilihat dari kemampuan keuangan perusahaan bahwa nilai denda yang diberlakukan dianggap lebih ringan daripada biaya untuk membuka lahan dengan cara tanpa pembakaran hutan. Langkah yang diambil pemerintah ini justru memberatkan masyarakat adat sehingga masyarakat adat yang tidak mampu membayar denda, mau tidak mau harus menerima hukuman. Dalam hal ini pemerintah dianggap tidak komprehensif dalam mencermati kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan sehingga banyak hal yang perlu dipahami oleh pemerintah terkait pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Pada dasarnya, masyarakat Dayak Ngaju, patuh dan taat pada aturan adat yang tentunya dapat menjaga keseimbangan hutan supaya tetap lestari. Konsepsi hutan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju mengandung falsafah hidup yang menghubungkan kehidupan seluruh makhluk dari alam atas, alam darat, dan alam bawah. Masyarakat Dayak Ngaju juga berkeyakinan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi memiliki peran masing-masing dan saling bersinergi dalam menjaga keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam yang sebut "*pukung pahewan*". Sinergi yang diciptakan oleh masyarakat Dayak Ngaju bertujuan untuk saling menjaga dan menghormati seluruh makhluk di muka bumi. Dengan demikian seluruh makhluk di bumi sama-sama menjaga hutan dan alam agar terhindarnya dari banjir, longsor, dan kekeringan. Berdasarkan fakta pada umumnya bahwa masyarakat adat mampu bertahan dengan ataupun tanpa investasi dari aturan yang dilayangkan dalam aturan Omnibus Law. Kemudian

dilihat dari fakta empiris, adanya ketidaksesuaian dan disharmoni norma dan implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk diteliti agar pemerintah mampu mencermati kedudukan masyarakat adat pada posisi yang tepat sehingga perlu dilakukan penelitian tentang sinergi hukum, yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Bagaimana sinergi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup? Penelitian ini tidak hanya difokuskan pada penggalian data pustaka. Namun, diarahkan pula pada penggalian data lapangan untuk memperkuat data-data yang akan diteliti dari berbagai sumber dan informan. Dengan demikian penelitian ini kemudian diolah menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif berbagai pihak yang terkait.

Hasil penelitian dikalsifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, tentang prinsip masyarakat Dayak Ngaju yang dikupas dari *pukung pahewan* menerapkan 6 prinsip dalam manajemen sumber hutan, yaitu: *handel* (kesinambungan); *himba* (keanekaragaman); *sub arep* (*sistensi*); *mihing* (organik); *hadat* (aturan ritual); dan *jipen* (hukum adat); dan *kedua*, ditemukan penggabungan dua kebijakan, yaitu *Top Down* dan *Bottom Up* dalam pembuatan undang-undang/peraturan daerah sehingga hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya diterapkan pemerintah saja tetapi juga diawasi oleh masyarakat adat. Dengan memperhatikan kesesuaian prinsip-prinsip masyarakat adat dalam memelihara dan menjadikan mereka sebagai garda terdepan untuk menguatkan lingkungan hidup. Konklusinya, teori sinergi ini mencoba memformulasikan cara membentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakomodasikan hukum nasional yang pembentukannya berdasar sinergi antara hukum adat dan hukum Islam (fikih bi'ah) yang melahirkan hukum nasional dengan memperhatikan berbagai aspek. Baik secara normatif maupun implementasinya dalam mengakomodasi semua kepentingan masyarakat adat, pemerintah maupun aspek agama.

## ABSTRACT

ARIYADI, NIM 170311020025, The Principles of Local Wisdom Dayak Community in Forest Management in Central Kalimantan (Building Synergy of Customary Law, Islamic Law, and National Law in Environmental Management), under the guidance of the first supervisor: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., and the second supervisor: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., at the Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords: principles, local wisdom, forest management, synergy, customary law, Islamic law, national law, environment

Forest deforestation which continues to erode the pace of natural destruction is a serious concern for researchers, this is exacerbated by the lack of a comprehensive perspective on the problem, as shown in the Omnibus Law on Job Creation, the fact that occurs in the reality is that the government fails to observe the position of indigenous peoples in the right position. Excessive praise for large-scale investments has so far shown the fact that it is very detrimental to indigenous peoples. The concept of forest in the Dayak indigenous contains a philosophy of life that all types of living things exist in nature and forests have their respective roles and functions. Whether in the form of plants, animals, or supernatural beings, which synergistically maintain the order, goodness, and balance of nature which is often called *pukung pahewan*. This is related to forests and nature to avoid floods, landslides, and droughts. Maintaining soil fertility can prevent natural disasters. Judging from the general fact that even without investment, indigenous peoples can survive and show high incomes. Then viewed from the empirical facts, it shows the occurrence of discrepancies and disharmony of norms and their implementation. Therefore, it is necessary to conduct research with the formulation of the problem, namely: What are the principles of local wisdom in forest management in the Dayak in Central Kalimantan? How is the synergy of customary law, Islamic law, and national law in environmental development?

This research was not only focused on extracting library data. However, it was also directed at extracting field data to strengthen the data to be studied from various sources and informants. Thus, this research was then processed using qualitative methods to describe and understand a particular organizational reality and phenomena that occur from the perspective of various related parties.

The results of this study were divided into two parts. First, regarding the principles of the Dayak Ngaju community which were discussed in the *pukung pahewan*, they applied 6 principles in forest resource management, namely: sustainability (*himba/tana*), diversity (*handiai*), subsistence (*arep*), organic (*mihing*), ritual (*hadat*), and customary law (*jipen*); and secondly, it was found that the combination of two theories, namely *Top-Down* and *Bottom-Up* in making laws so that national laws in the legislation were not applied by the government alone. However, it also needs to be adjusted to the principles of indigenous peoples in maintaining and making them the frontline and strengthening each other to protect the environment. In conclusion, this synergy

theory tries to formulate ways to form laws and regulations so that they can accommodate national law whose formation is based on the synergy between customary law and Islamic law (fikih bi'ah) which gives birth to national law by taking into account various aspects. Both normatively and in its implementation, it is hoped that it can accommodate all interests of indigenous peoples, government, and religious aspects.

## ملخص البحث

أريادي ، ر.ق.ط.: 170311020025 مبادئ الحكمة المحلية لمجتمع داياك في إدارة الغابات في وسط كاليمانتان (بناء التآزر بين القانون العرفي والشريعة الإسلامية والقانون الوطني في الإدارة البيئية)، رسالة الدكتوراه كلية الدراسات العليا، جامعة بنجارماسين الإسلامية الحكومية. المشرف الأول أ.د. أحمد حسن، والثاني د. غوستي مزينة. 2022م

الكلمات المفتاحية: المبادئ، الحكمة المحلية، إدارة الغابات، التآزر، القانون العرفي، الشريعة الإسلامية، القانون الوطني، البيئة.

تعد إزالة الغابات نشاطاً واسع النطاق لقطع الأشجار يعمل على تسريع تدمير الغابات والطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر تدمير الغابات أيضاً بقانون خلق فرص العمل الذي يؤكد على إدارة الغابات على الاستثمار من البلدان الخارجية مثل وجود شركات تعدين الذهب أو الفحم ومزارع نخيل الزيت التي يملكها عمومًا جهات خارجية. هذا بالتأكيد يهدد رفاهية المجتمع بالنظر إلى أن حياة مجتمع Dayak Ngaju يصدر من المنتجات الطبيعية. ومع ذلك، مع وجود القانون الشامل، الذي يفرض الغرامات قبل العقوبة، فإنه في الواقع يحكم على الشعوب الأصلية ويسهل الأمر على الشركات. انطلاقاً من القدرة المالية للشركة، أن قيمة الغرامة المفروضة تعتبر أخف من تكلفة تطهير الأرض بغير حرق الغابات. لقد أثقلت هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الشعوب الأصلية عبئاً، بحيث يتعين على السكان الأصليين غير القادرين على دفع الغرامة، بقبول العقوبة حتمًا. في هذه الحالة، تعتبر الحكومة غير شاملة في معاناة موقف الشعوب الأصلية في إدارة الغابات. فمن المفروض أن تفهم الحكومة كل الأشياء فيما تتعلق بإدارة الغابات التي يقوم بها السكان الأصليون. في الأساس، فإن مجتمع Dayak Ngaju مطيعون للقواعد العرفية لأجل الحفاظ على توازن الغابة بحيث تظل مستدامة. يحتوي تصور الغابة لدى مجتمع Dayak Ngaju الأصلية على فلسفة الحياة التي تربط حياة جميع الكائنات من العالم العليا وما على الأرض والعالم السفلي. يعتقد مجتمع Dayak Ngaju أيضاً أن جميع الكائنات الحية على الأرض لها أدوارها الخاصة وتتآزر مع بعضها البعض في الحفاظ على نظام الطبيعة وصلاحتها وتوازنها والتي تسمى *pukung pahewa*. يهدف النظام الذي أنشأه مجتمع Dayak Ngaju إلى حماية واحترام جميع الكائنات على الأرض. وبالتالي، يهدف إلى التآزر في الحفاظ على الغابات معاً في النهاية والطبيعة لتجنب الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف.

استناداً إلى الحقيقة العامة المتمثلة في أن الشعوب الأصلية قادرين على البقاء على قيد الحياة مع استثمار القواعد المنصوصة من القانون الشامل أو بدونها. ومن الحقائق التجريبية، هناك تناقض وتنافر في المعايير وتنفيذه.

لذلك، فإن الموضوع في حاجة ماسة للبحث ليتم التحقيق فيه حتى تكون الحكومة قادرة على مراقبة موقف الشعوب الأصلية في الوضع الصحيح بحيث والبحث حول التآزر القانوني، وهي: ما هي مبادئ الحكمة المحلية في إدارة الغابات في مجتمع Dayak في وسط كاليمانتان؟ ما هو التآزر بين القانون العرفي والشريعة الإسلامية والقانون الوطني في التنمية البيئية؟ لا يركز هذا البحث على استخراج بيانات المكتبة فقط. ومع ذلك، فهي موجهة أيضاً إلى استخراج البيانات الميدانية لتقوية البيانات المراد دراستها من مختلف المصادر والمخبرين. وبالتالي، تتم معالجة هذا البحث باستخدام أساليب نوعية لوصف وفهم واقع وظواهر منظمة معينة تحدث من منظور مختلف الأطراف ذات الصلة.

يتم تصنيف نتائج البحث إلى قسمين. أولاً، فيما يتعلق بمبادئ مجتمع Dayak Ngaju التي تم تحليلها من *pukung pahewan*، وتطبيق ست المبادئ في إدارة موارد الغابات، وهي: *handel* (الاستدامة)؛ *himba* (التنوع)؛ *sub arep* (إعانة)؛ *mihing* (عضوي)؛ *hadat* (قواعد الطقوس)؛ و *jipen* (القانون العرفي)؛ وثانياً، المزج بين سياسيتين، وهما *Bottom Up* و *Top Down* في وضع القوانين المحلية، بحيث يتم تنفيذ القوانين الوطنية من قبل الحكومة،

بجانب الإشراف من قبل الشعوب الأصلية . امتثال مبادئ الشعوب الأصلية له آثار إيجابية في الحفاظ على الغابات وجعلهم في حط المواجهة لتعزيز البيئة. وللاستنتاج، تحاول هذه نظرية التآزر صياغة طرق تشكيل التشريعات، بحيث يمكن أن يستوعب القانون الوطني الذي يعتمد تشكيله على التآزر بين القانون العرفي والقانون الإسلامي (الفقه). فهذا القانون الوطني من خلال مراعاة مختلف النواحي، من الناحية المعيارية والناحية التنفيذية لمراعاة جميع مصالح الشعوب الأصلية والحكومة والجوانب الدينية معا.